

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.2005.
- Boehm R . *Possibility Of disinfectance*. Slaughterhouse Wastewater. Die Fleischirtschaft.1989.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2003.
- Hardari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada: Univeristas Press.1991.
- Lestari. *Rancangan Bangunan Rumah Potong Hewan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aneka Lestari.1994.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.2008.
- Manual Kesmavet. *Pedoman Pembinaan Kesmavet*. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Hewan. Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian.2001.
- Muhamad Taufik Makarao. *Aspek Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT Indkes Kelompok Gramedia.2004.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.2009.
- Niniek Suparni. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.1992.
- Nuhriawangsa. *Pengantar Ilmu Ternak Dalam Pandang Islam: Suatu Tinjauan Tentang Fiqih Ternak*.Surakarta: Fakultas Universitas Sebelas Maret.1999.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001.
- Soeharno. *Zonosis Penyakit Hewan Ke Manusia Volume 1*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Produksi Hewan Perternakan.2001.
- Suharno Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2006.

UNDANG-UNDANG

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)
- b) Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- e) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan / OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*)

- f) Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan,
- g) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- i) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kptsn/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan.
- j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- k) Rancangan Undang-Undang Pertenakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab U Pasal 1 ayat 15 BAB VI Pasal 62
- l) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1984, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274), ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang Undang Perindustrian .
- m) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air.
- o) Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kriteria Mutu Air Sungai Sumatra Barat
- p) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan.
- q) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Air Minum
- r) pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- s) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

